

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Keuangan

1. Pengertian Manajemen Keuangan Sekolah

Menurut Depdiknas bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah .

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.¹

Menurut R. Agus Sartono, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif dan efisien maupun

¹ Hasibuan, Anggita Rizki Defiani. "Penerapan Tata Kelola Keuangan Pendidikan Sekolah Dasar Pada Akhir Periode Tahun 2020." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 4.1 (2021): 304-309.

usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien².

Manajemen keuangan meliputi perencanaan financial, pelaksanaan, dan evaluasi. Jones mengemukakan financial planning is called budgeting merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa terjadi efek samping yang merugikan. Implementation involves accounting atau pelaksanaan anggaran ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap pencapaian tujuan.³

Demikian pula agar organisasi menjadi maju diperlukan manajemen yang baik untuk menata segala bidang yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan, pembinaan terhadap anggota organisasi sebagai sumber daya manusia, bidang sarana dan prasarana, bidang administrasi dan termasuk juga bidang keuangan⁴.

2. Fungsi Manajemen Keuangan

a. Perencanaan manajemen keuangan

Menurut Mulyasa perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan

² R. Agus Sartono, Manajemen keuangan Teori dan Aplikasi, Yogyakarta; FE UGM, 2001, Cet ke-1, hlm. 6.

³ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, h. 257.

⁴ Abdul Choliq. Modul Kuliah Pasca Sarjana.

menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau budget , sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan.

Perencanaan keuangan sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan, yakni penyusunan anggaran, dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah (RAPBS). Kedua kegiatan pokok tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan anggaran keuangan sekolah

Perencanaan keuangan sekolah memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rancangan anggaran. Adapun prinsip-prinsip dan prosedur penyusunan anggaran:

- a. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi;
- b. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran;
- c. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi;
- d. Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah.

Dalam penyusunan anggaran keuangan sekolah ada beberapa tahapan guna mencapai penyusunan anggaran yang optimal. Tahapan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: ⁵

- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.
 - b. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang.
 - c. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.
 - d. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu
 - e. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
 - f. Melakukan revisi usulan anggaran.
 - g. Persetujuan revisi usulan anggaran.
 - h. Pengesahan anggaran.⁶
2. Pengembangan rencana anggaran sekolah

Penyusunan anggaran keuangan sekolah atau sering disebut anggaran belanja sekolah (ABS), biasanya dikembangkan dalam format-format yang meliputi:

⁵ Imron, Moh Jamaluddin. "Manajemen pembiayaan sekolah." AL-IBRAH 1.1 (2016): 69-93.

⁶ Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h.50.

- a. Sumber pendapatan terdiri dari UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan), DPP (Dana Penunjang Pendidikan), OPF; dan lain-lain;
- b. Pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, honorarium dan kesejahteraan.

Pada proses pengembangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pada tingkat kelompok kerja

Kelompok kerja yang dibentuk sekolah, yang terdiri dari para pembantu kepala sekolah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, selanjutnya diklasifikasikan, dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan oleh kelompok kerja selanjutnya dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan, khususnya proses belajar mengajar maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia.

b. Pada tingkat kerja sama dengan komite sekolah

Kerjasama antara komite sekolah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk diatas, dilakukan untuk melakukan rapat pengurus dan rapat anggota dengan pengembangan RAPBS. Komite sekolah dapat memberikan pertimbangan, membantu mengontrol kebijakan program sekolah. Kerjasama antara komite sekolah dengan kelompok kerja yang dibentuk, hal ini dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBS.

c. Sosialisasi dan legalitas

Setelah RAPBS dibicarakan dengan komite sekolah selanjutnya disosialisasikan kepada beberapa pihak. Pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBS kepada yayasan untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.

b. Pelaksanaan Keuangan

Pelaksanaan keuangan digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Menurut Mulyasa dalam pelaksanaan/penggunaan keuangan dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran.⁷

⁷ Muzdhalifah, Siti. Manajemen Keuangan dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mutathowi'in Kebonsari Madiun. Diss. IAIN Ponorogo, 2021.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan.

⁸Biaya (cost) dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Dalam pengertian ini, misalnya, iuran siswa adalah jelas merupakan biaya, tetapi sarana fisik, buku sekolah dan guru juga adalah biaya. Bagaimana biaya-biaya itu direncanakan, diperoleh, dialokasikan, dan dikelola merupakan persoalan pembiayaan atau pendanaan pendidikan (educational finance). Untuk itu “Pelaksanaan keuangan sekolah dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yakni penerimaan dan pengeluaran.”⁹

1. Penerimaan

Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari beberapa sumber. Penerimaan keuangan sekolah dari

⁸ Prof. Dr. Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet ke -4, h. 3-4.

⁹ E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, hal. 201.

sumber-sumber perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang disepakati, baik berupa konsep teortis maupun peraturan yang berlaku. Berdasarkan buku pedoman rencana, program dan penganggaran, sumber dana pendidikan yang dapat dikembangkan dalam anggaran belanja sekolah antara lain meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, dan penunjang pendidikan, dana masyarakat, donatur dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak. Pendanaan pendidikan yang pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat, namun dapat diperoleh bentuk kerjasama usaha atau wakaf. Namun pada dasarnya sekolah yang berdiri di bawah naungan yayasan memiliki kewenangan dan keleluasaan cukup dalam bagaimana mendapatkan sumber dana keuangan untuk mengoptimalkan kegiatan pendidikan di sekolah.

2. Pengeluaran

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu di gunakan secara efektif dan efisien. Artinya setiap perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan. Dalam manajemen keuangan sekolah, pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan patokan bendahara dalam pertanggungjawaban pembukuan, meliputi

format buku kas harian, buku tabelaris, dan format laporan daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta peruntukannya. Sebagai bendahara sekolah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan masalah pelaksanaan keuangan sekolah, yaitu : (1) Pada setiap tahun akhir anggaran, bendahara harus membuat laporan keuangan sekolah kepada kepala sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS. (2) Laporan keuangan harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada termasuk bukti penyetoran pajak (PPN dan PPh) bila ada.

3. Evaluasi Keuangan

Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan proses mengevaluasi rangkaian proses pembiayaan pendidikan mulai tahap akhir pembiayaan pendidikan. Evaluasi pembiayaan pendidikan dalam hal ini dikategorikan sebagai proses pertanggung jawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan pendidikan.¹⁰

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disyahkan PP. No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan memang menjadi babak baru bagi dunia pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia.

¹⁰ Nuril Azizah Megananda, "Manajemen Pembiayaan dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2018), 52

Artinya, Negara telah menyadari keanekaragaman model dan bentuk pendidikan yang ada di Indonesia. Keberadaan peraturan tersebut telah menjadi “tongkat penopang” bagi madrasah diniyah yang sedang mengalami krisis identitas. Selama ini, penyelenggaraan pendidikan diniyah ini tidak banyak diketahui sebagaimana pola pengelolaannya tetapi karakteristiknya yang khas menjadikan pendidikan ini layak untuk dimunculkan dan dipertahankan eksistensinya.¹¹

Dalam manajemen keuangan evaluasi dan pertanggung jawaban menjadi penting. Evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan sekolah dapat diidentifikasi kedalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggung jawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak internal lembaga pendidikan.¹²

Melalui hasil evaluasi berupa informasi untuk mengambil keputusan, sehingga informasi/datanya harus dapat dipertanggung jawaban (valid/-reliable). Pertanggung jawaban keuangan berisi deskripsi penerimaan, penggunaan dan pengadministrasian keuangan, khususnya yang digunakan untuk program-program sekolah. Deskripsi hendaknya sampai pada analisis apakah dana

¹¹ Umar Sidiq dan Wiwin Widyawati, Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam di Indonesia (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 71.

¹² E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, hlm. 204-205.

digunakan secara efisien dan sesuai dengan pedoman administrasi keuangan yang berlaku.

1. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan

Prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan Manajemen keuangan pendidikan perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal (48) menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas public. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan.

¹³Berikut prinsip-prinsip manajemen keuangan, yaitu:

a. Transparansi

Transparan berarti keterbukaan. Transparan di bidang manajemen keuangan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola dana pendidikan. Pada lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Transparansi juga dapat

¹³ Manahan Tampubolon, *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan (Education and Finance Plan)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 189.

meningkatkan kepercayaan sebagai timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah perihal tanggung jawab. Akuntabilitas dapat diartikan kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawab orang tersebut. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Adanya tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

- a. Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah,
- b. Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, serta
- c. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.

c. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner (2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, melainkan sampai pada hasil kualitatif yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input), dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

1. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.
2. Dilihat dari segi hasil Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.

B. Keterampilan Vokasi

1. Pengertian Keterampilan Vokasi

Menurut Diniyati, Nurul (2015) Pendidikan vokasional bisa dikatakan penggabungan teori dan praktik yang dilakukan secara seimbang dengan orientasi pada kesiapan dalam bekerja para lulusannya. Dalam pendidikan vokasional, kurikulum terkonsentrasi pada sistem pembelajaran keahlian apprenticeship of learning pada kejuruan-kejuruan khusus specific trades. Pendidikan vokasional mempunyai kelebihan yaitu peserta didik dapat secara langsung mengembangkan keahliannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja kedepannya.

Karakteristik pendidikan vokasi dapat dilakukan dengan mempersiapkan peserta didik yang siap kerja setelah lulus pendidikan tertentu. Selain dipersiapkan untuk kerja pada sektor formal, pendidikan vokasi juga membekali siswa keterampilan wirausaha, sehingga memberikan kesempatan lulusan Madrasah Aliyah yang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk melanjutkan kuliah bisa bekerja sesuai dengan kemampuan yang diajarkan saat menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah. Hal ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan secepatnya, agar siswa madrasah memperoleh kesempatan setara dengan SMK.

Pendidikan vokasi pada siswa atau santri Madrasah menjadi nilai plus, karena penggabungan ilmu agama islam dengan kompetensi keahlian yang dimiliki para alumninya memberikan warna baru pada generasi penerus bangsa selanjutnya, yakni menciptakan generasi islam

yang mampu bersaing dengan perkembangan teknologi dan industri, sehingga peningkatan ekonomi yang sudah ditargetkan pemerintah bisa terwujud secara maksimal.¹⁴

Menurut peneliti kesimpulan dari penjelasan diatas adalah pendidikan vokasi pada Madrasah Aliyah ini tidak akan berjalan secara maksimal jika tidak dibarengi dengan pengelolaan manajemen keuangan yang baik maka dari itu pengelolaan manajemen keuangan dalam vokasi Madrasah Aliyah sangat penting untuk menunjang jalannya vokasi pendidikan tersebut.

2. Prinsip Dasar Keterampilan Vokasional

Pengembangan serta penataan terhadap tatanan pendidikan keterampilan vokasional ini perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar yaitu:¹⁵

- a. Pendidikan vokasional merupakan pendidikan ekonomi, dimana pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang disebabkan oleh kebutuhan pasar kerja, memberikan urunan terhadap kekuatan sektor ekonomi nasional. Prinsip tersebut erupakan prinsip pendidikan investasi ekonomi pendukung dan penyangga pembangunan ekonomi nasional.
- b. Pendidikan dan keterampilan vokasional ini harus memperhatikan pada permintaan pasar kerja. Tingkat relevansi antara pendidikan

¹⁴ Skula, Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah Vol. 2, No 3, 2022

¹⁵ Putu Sudira, *Filosofi dan Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan*, (Yogyakarta: UNY Press), 2012, hal. 35

keterampilan vokasional dapat diukur dari tingkat kesesuaian program pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.

- c. Pendidikan dan keterampilan vokasional akan efisien apabila lingkungan praktik atau tempat pelatihannya merupakan gambaran dari lingkungan yang hendak ditekuni dalam pekerjaan dimasa mendatang.
- d. Pendidikan keterampilan vokasional akan efektif apabila terdapat penguatan keterampilan dalam bentuk berbagai tugas latihan yang dilakukan dengan metode, alat dan mesin yang sama dengan penempatan di bidang pekerjaannya. Prinsip ini merupakan prinsip pokok, dimana siswa akan menjadi paham karena ia pernah menggunakan atau familiar dengan metode, alat atau mesin tersebut.
- e. Pendidikan keterampilan vokasional akan efektif apabila diklat keterampilan dapat membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir yang benar dan diulang sehingga sesuai dengan keperluan di lapangan pekerjaan.
- f. Pendidikan keterampilan vokasional akan efektif jika memberikan kemampuan kepada setiap individu memberikan modal minat serta potensinya pada tingkat tertinggi.
- g. Pendidikan keterampilan vokasional akan efektif apabila setiap profesi, jabatan atau pekerjaan hanya untuk seseorang memerlukan dan menginginkan keuntungan atas dirinya.
- h. Pendidikan keterampilan vokasional akan maksimal apabila pelatih, pembina dan instruktur memiliki pengalaman yang sukses dalam

penerapan keterampilan pada operasi dan proses kerja yang dilakukan.

- i. Pendidikan keterampilan vokasional memiliki hubungan yang erat dengan DUDI atau Dunia Usaha Dunia Industri karena hal tersebut merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan pendidikan keterampilan vokasional.
- j. Pendidikan keterampilan vokasional memiliki responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi.
- k. Pembiasaan pada seseorang tercapai efektif apabila pelatihan yang diberikan merupakan pekerjaan nyata dengan syarat nilai.
- l. Isi diklat merupakan okupasi pengalaman para ahli dan profesional.
- m. Setiap okupasi/vokasi memiliki ciri-ciri isi atau materi yang berbeda dengan yang lainnya.
- n. Pendidikan keterampilan vokasional merupakan layanan efisien jika disesuaikan dengan kebutuhan seseorang yang membutuhkan.
- o. Pendidikan keterampilan vokasional membutuhkan biaya investasi dan operasional yang lebih besar dari pendidikan umum.¹⁶

¹⁶ Putu Sudira, *Filosofi dan Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan*, (Yogyakarta: UNY Press), 2012, hal. 35